

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pemerintahan di setiap negara di dunia memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pada umumnya pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai proses yang mengakibatkan peningkatan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang, seiring dengan perbaikan sistem kelembagaan (institutional) (Arsyad, 2010). Tingkat pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di Indonesia sangat berkaitan dengan pemerataan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, pemerataan pendapatan menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan meningkatkan pembangunan yang disertai dengan perubahan kualitas hidup masyarakat. Perekonomian yang bertumbuh secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurut Badriah (2019) antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan menjadi sebuah *trade off* untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, yaitu pembangunan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pembangunan dalam rangka pemerataan. Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan kekayaan sekelompok orang, sementara itu kelompok masyarakat yang tidak aktif berkontribusi dalam proses menciptakan pertumbuhan ekonomi tidak akan merasakan manfaat dari peningkatan ekonomi tersebut. Semakin banyak masyarakat yang berkontribusi dalam terciptanya pertumbuhan ekonomi maka manfaat yang akan diterima masyarakat semakin luas. Konsekuensi dari banyaknya masyarakat yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi yang dicapai karena adanya perbedaan kemampuan antar kelompok

masyarakat dalam berkontribusi menciptakan pertumbuhan ekonomi. Menurut Sjafrizal (2008) Terdapatnya perbedaan pertumbuhan ekonomi yang besar antar wilayah mengakibatkan kurangnya efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia dan mendorong terjadinya ketidakmerataan dalam pendapatan. Ketidakmerataan dalam pendapatan ini yang disebut dengan Ketimpangan Pendapatan.

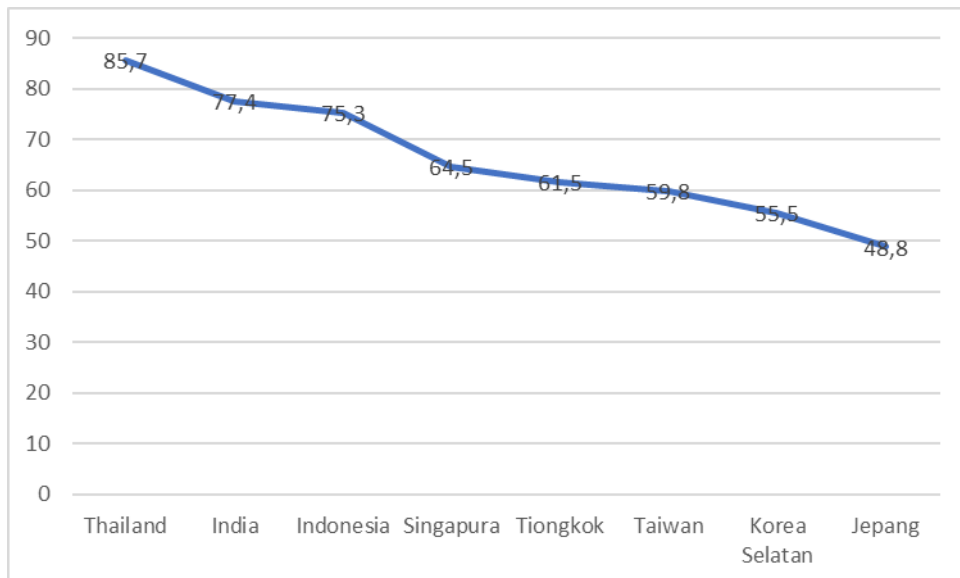
Menurut Ariza (2017) ketimpangan pendapatan tidak hanya terjadi di skala lokal namun terjadi juga pada skala nasional. Bahkan dalam lingkup internasional, ketimpangan pendapatan menjadi masalah yang sangat nyata dan seringkali menjadi perhatian serius. Jika tidak ditangani dengan hati-hati ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan krisis yang lebih kompleks, termasuk isu-isu terkait kependudukan, ekonomi, sosial, politik, dan hasil yang ingin dicapai dari pembangunan suatu wilayah.

Menurut *United Nation Development Program* (2013) selama dua dekade terakhir, ketimpangan pendapatan di hampir semua negara di dunia telah meningkat. Hal ini juga terjadi di negara-negara Asean, di mana tingkat ketimpangan pendapatan sangat tinggi, wilayah Asia Tenggara menjadi satu-satunya di Asia Pasifik yang mengalami peningkatan kesenjangan yang semakin lebar. Menurut Haris (2014) Ketimpangan pada negara-negara sedang berkembang cenderung memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Hal ini disebabkan karena pada saat awal pembangunan, kesempatan dan peluang dimanfaatkan oleh daerah yang memiliki kondisi pembangunan yang baik, sementara daerah dengan kondisi pembangunan yang kurang baik atau terbelakang belum mampu memanfaatkan peluang tersebut karena terkendala oleh rendahnya sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya manusia yang juga rendah.

Akumulasi pengukuran kesenjangan umumnya di tunjukkan oleh perhitungan rasio gini di berbagai negara. Sebuah studi dari Ardakani (2020) mengatakan bahwa fenomena gini rasio disebabkan oleh adanya distribusi pendapatan yang tidak sama sehingga menyebabkan tidak meratanya perekonomian dan umumnya terjadi pada negara berkembang. Ketimpangan

tersebut menimbulkan kemakmuran untuk sebagian kelompok tetapi juga menimbulkan kemiskinan untuk sebagian kelompok lainnya.

Ketimpangan pendapatan di kawasan Asia cukup tinggi, meskipun beberapa negara di Asia telah mengalami kemajuan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Menurut data Bank Dunia (2018) di kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik memiliki nilai rata-rata rasio Gini sebesar 38,1. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata di seluruh dunia yaitu sebesar 33,9. Beberapa negara yang mengalami ketimpangan pendapatan yang tinggi di Asia meliputi Thailand, India dan Indonesia.



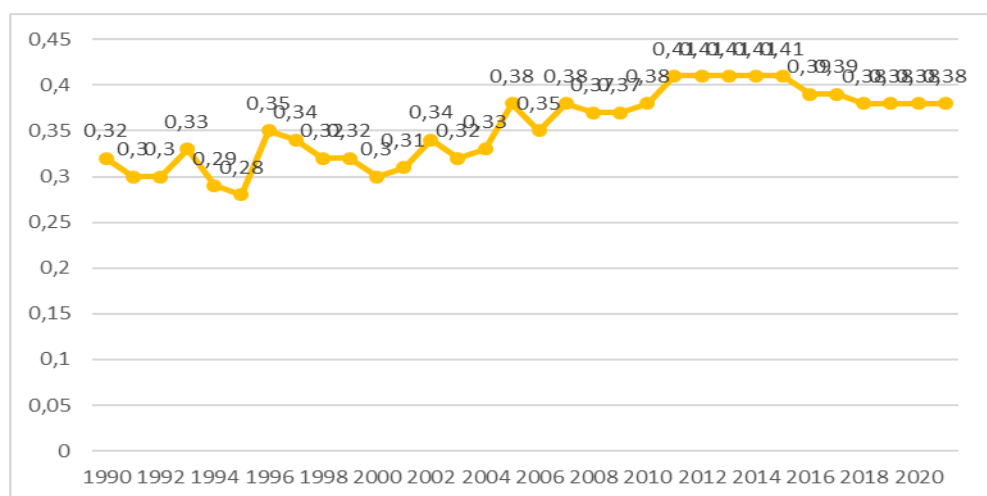
Sumber: Credit Suisse 2018

Gambar 1. Ketimpangan pendapatan di Asia tahun 2018

Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan ketimpangan pendapatan yang tinggi di Indonesia menempati peringkat ke 3 di Asia, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat di Indonesia. Untuk sebuah negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan, keadilan sosial dan persatuan itu merupakan hal yang perlu ditangani secara serius. Situasi ini juga mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia masih berada pada tingkat yang cukup tinggi, sehingga dapat menjadi permasalahan serius di masa mendatang.

Gini rasio digunakan menjadi salah satu indikator dalam menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia. Indeks Gini, Rasio Gini, atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang pertama kali dikembangkan oleh statistikus Italia bernama Corrado Gini dan dipublikasikan pada tahun 1912 (*International NGO Forum on Indonesia Development*, 2018). Menurut Syafri (2019) Gini rasio diukur berdasarkan nilai konsumsi rumah tangga akan barang, jasa dan non-jasa. Gini Rasio adalah suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan, dengan nilai berada dalam rentang 0 hingga 1. Jika nilai Gini Rasio mendekati angka 0 maka menunjukkan pemerataan pendapatan yang sempurna, sedangkan jika nilainya semakin mendekati 1 maka menunjukkan tingkat ketimpangan yang sempurna.

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan yang tinggi, Sehingga timbul tuntutan masyarakat untuk mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan tersebut. Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu tahun 1990-2021 koefisien gini di Indonesia mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. berikut ini adalah data ketimpangan pendapatan dari tahun 1990 hingga 2021 yang memberikan gambaran perubahan kettimpangan pendapatan di indonesia selama 32 tahun.



Sumber: Badan Pusat Statistik 2021

Gambar 2. Gini Ratio di Indonesia tahun 1990-2021

Berdasarkan data yang disajikan, Indonesia menghadapi kondisi yang sulit akibat tingginya tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi. Ketimpangan pendapatan di Indonesia tertinggi dengan nilai 0,41 terjadi pada tahun 2011 sampai 2015 dan merupakan yang terburuk pada dua dekade terakhir. Terjadinya penurunan koefisien gini terjadi secara signifikan pada tahun – tahun berikutnya, seiring dengan pergantian pemerintahan serta kebijakan pembangunan yang dilakukan sehingga terjadinya perubahan yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Meskipun nilai koefisien gini masih di atas batas aman tetapi penurunan yang terjadi tersebut merupakan hal yang positif untuk menurunkan angka ketimpangan di Indonesia.

Menurut Bock (2014) angka koefisien Gini telah melebihi batas yang dianggap wajar yaitu ketika nilai rata-rata koefisien Gini melebihi 0,40. Fluktuasi dan meningkatnya koefisien Gini Indonesia setiap tahunnya disebabkan oleh masih terkonsentrasinya aktivitas ekonomi di kawasan barat Indonesia (KBI) selama beberapa dekade terakhir. Data BPS pada triwulan IV 2015 menunjukkan bahwa struktur perekonomian Indonesia masih didominasi oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa, yang memberikan kontribusi sebesar 57,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), diikuti oleh Sumatera 22,0 persen, Kalimantan 9,1 persen, Sulawesi 5,6 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,9 persen, serta Maluku dan Papua 1,9 persen. Sebagian besar aktivitas ekonomi nasional berpusat di kawasan barat Indonesia (KBI) yang menguasai sekitar 80% dari kegiatan ekonomi nasional.

Menurut Efni (2009) inflasi adalah kondisi di mana jumlah peredaran uang lebih banyak daripada jumlah barang yang beredar, sehingga menyebabkan penurunan daya beli uang dan terjadinya kenaikan harga. Jika inflasi tinggi dan tidak diimbangi dengan pemerataan ekonomi yang baik, dampaknya dapat memperluas kemiskinan, meningkatkan tingkat pengangguran, menurunkan kesejahteraan, dan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Laju inflasi yang tinggi menurut Bank Indonesia (2020) akan menyebabkan tingkat bunga nominal yang lebih tinggi, sehingga

keseimbangan nilai uang riil akan menurun. Inflasi yang tinggi harus dicegah agar pasar tenaga kerja dapat tumbuh dengan baik. Dalam proses pembangunan ekonomi selalu disertai oleh terjadinya inflasi, namun tingginya inflasi dapat menghambat pembangunan. Dalam pembangunan ekonomi nasional inflasi yang rendah dan stabil sangatlah diperlukan.

Menurut Yustika (2010) Inflasi sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat menengah kebawah. Untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil serta mengurangi ketimpangan pendapatan, perlu dilakukan kebijakan yang mengarah pada peningkatan kerangka kerja kelembagaan, sehingga kinerja ekonomi makro dapat mengatur inflasi yang rendah dan stabil serta dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif, inflasi yang tinggi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan dan sebaliknya. Pernyataan ini di dukung oleh penelitian Negara (2011) bahwa inflasi yang stabil dan rendah sangat diperlukan oleh suatu negara untuk menurunkan ketimpangan pendapatan. Menurut Bank Dunia tingkat inflasi yang baik untuk suatu negara adalah 2-3% per tahun.

Selain inflasi, peran suku bunga sangatlah penting. Menurut Elida (2015) BI rate adalah suku bunga kebijakan BI yang mencerminkan sikap (*stance*) kebijakan moneter yang ditetapkan oleh BI, yang diumumkan kepada masyarakat agar dapat dijadikan acuan di dalam mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi. Dalam konteks kebijakan moneter, kebijakan suku bunga Bank Sentral memiliki pengaruh krusial terhadap kondisi perekonomian, termasuk pelaku ekonomi dan pendapatan masyarakat. Suku bunga merupakan tingkat bunga yang dinyatakan dalam persentase dengan jangka waktu tertentu, seperti per bulan atau per tahun.

Menurut Rozali (2020) semakin tinggi suku bunga menyebabkan meningkatnya biaya modal dan ekspansi bisnis akan sulit dilakukan oleh perusahaan. Aktivitas perekonomian akan bergerak lambat serta peluang usaha dan peluang kerja menjadi rendah. Kenaikan biaya modal akan mendorong perusahaan untuk mengambil tindakan yang mungkin mengurangi upah tenaga kerja atau mengurangi jumlah tenaga kerja guna menjaga efisiensi operasional

perusahaan, namun dampak dari langkah tersebut dapat menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat dan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini dapat berimplikasi pada kondisi sosial-ekonomi yang sulit bagi sebagian kalangan masyarakat sehingga penting untuk mempertimbangkan kebijakan yang seimbang dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan tersebut. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian Berisha., *et al* (2018) yang menyatakan bahwa hubungan antara suku bunga dan ketimpangan distribusi pendapatan dalam penelitian tersebut negatif. Dengan naiknya suku bunga akan mendorong stabilitas harga sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dengan meningkatnya daya beli kelompok masyarakat kurang mampu.

Menurut Berata (2013) impor adalah kegiatan memasukan barang dari luar negeri kedalam wilayah Indonesia atau daerah pabean. Basri (2014) impor adalah kegiatan mengadakan barang atau jasa dari luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi, produksi, atau investasi di dalam negeri. Fauzia (2019) impor berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Apabila impor mengalami penurunan maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan sebaliknya, apabila impor meningkat melebihi ekspor, maka terjadi defisit neraca perdagangan yang menyebabkan dana untuk membiayai proses produksi akan habis sehingga berdampak pada volume produksi yang menurun, pengurangan jumlah tenaga kerja dan menurunkan tingkat pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan ketimpangan pendapatan. Salah satu faktor penyebab defisit neraca perdagangan adalah meningkatnya permintaan minyak, gas impor dan merosotnya kinerja ekspor non migas (Ginting, 2014). Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang tepat untuk mengendalikan impor dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.

Faktor determinan dari ketimpangan pendapatan salah satunya adalah memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju (Badriah, 2020).

Menurut Mahyus (2014) nilai tukar atau kurs merupakan harga suatu mata uang relatif terhadap mata uang negara lain. Setiap mata uang yang dimiliki sebuah negara memiliki harga atau nilai yang berbeda dan mengalami perubahan setiap harinya. Menurut Samuelson (2019) di antara faktor yang mempengaruhi daya beli tergantung pada nilai tukar (kurs). Semakin tinggi nilai tukar mata uang asing dan melemahnya rupiah memberikan dampak meningkatnya harga barang dan produk dalam negeri terutama yang bahan bakunya merupakan hasil impor. Biaya produksi barang tersebut akan meningkat yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh kenaikan harga barang yang akan menurunkan aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat. Menurunnya pendapatan masyarakat dapat memperlebar gap ketimpangan pendapatan di Indonesia dan melemahnya nilai tukar rupiah dalam jangka panjang juga dapat memicu meningkatnya ketimpangan pendapatan.

Menurut Mukhlis (2017) meningkatnya mata uang rupiah dapat mengakibatkan produk dalam negeri semakin mahal dan dampaknya produk lokal tidak bisa bersaing dengan produk negara lain karena masyarakat lebih memilih produk impor yang lebih murah, sehingga nilai tukar yang stabil sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha dalam melakukan berbagai aktivitas ekonominya, baik konsumsi maupun investasi, sehingga perekonomian nasional dapat berkembang dan menurunkan ketimpangan pendapatan.

Menurut Sukirno (2012), pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian melalui instrumen anggaran negara. Ketimpangan pendapatan telah menjadi permasalahan utama global, upaya pemerintah dalam menguranginya sangat diharapkan oleh masyarakat. Meski buktinya masih belum konklusif, banyak ahli mengklaim bahwa salah satu alat penting untuk menurunkan ketimpangan pendapatan adalah melalui pengeluaran pemerintah (Anderson, 2017). Menurut Miyata (2017) Ketimpangan pendapatan di daerah disebabkan oleh perbedaan dalam aktifitas ekonomi dan tingkat ketersediaan infrastruktur. Oleh karena itu,

pemerintah perlu melakukan intervensi dalam perekonomian nasional dengan fokus pada pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur melalui pengeluaran pemerintah.

Pemerintah memiliki peran distribusi yaitu sebagai penyesuai distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin terpenuhinya distribusi kepada masyarakat yang merata dan adil. Pengeluaran pemerintah memiliki tujuan utama untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menurunkan ketimpangan pendapatan (Putri *et al.*, 2018).

Tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia masih berfluktuasi dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor meskipun pengeluaran pemerintah naik setiap tahunnya, salah satunya yaitu alokasi dari pengeluaran pemerintah itu sendiri yang masih terfokus pada suatu wilayah. Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting untuk menurunkan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Jika pengalokasian dana dari pengeluaran pemerintah dilakukan secara tepat dan merata, maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan melalui penciptaan lapangan kerja, namun jika alokasi pengeluaran pemerintah tidak sesuai dengan target yang ditentukan maka hal ini dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya ketimpangan pendapatan.

Selain itu, penurunan ketimpangan pendapatan juga berkaitan dengan rasio pajak. Menurut Putri, *et al* (2015) Apabila rasio pajak menurun, hal ini dapat meningkatkan kemampuan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga konsumsi masyarakat akan meningkat. Kenaikan tingkat konsumsi ini akan berdampak pada peningkatan produksi barang dan jasa yang akan menyebabkan pendapatan meningkat dan menurunkan angka ketimpangan pendapatan. Menurut Bastagli, *et al* (2012) Pemerintah negara maju melakukan upaya intervensi dalam pemerataan distribusi pendapatan dengan menggabungkan penerapan kebijakan pajak yang tepat dengan distribusi pengeluaran pemerintah yang efisien dan produktif.

Penerimaan pajak yang meningkat dapat berpengaruh terhadap bertambahnya penerimaan PDB. Jika peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) diarahkan untuk belanja dalam negeri, maka kenaikan rasio pajak akan memiliki dampak signifikan bagi perekonomian secara keseluruhan. Peningkatan rasio pajak dapat mengurangi tingkat konsumsi masyarakat sehingga mendorong untuk menyimpan pendapatan dalam bentuk tabungan, yang kemudian dapat diakumulasikan untuk keperluan investasi yang berpengaruh pada meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga ketimpangan pendapatan akan menurun (Adisasmita, 2013), namun teori ini tidak sesuai dengan penelitian (Apriesta, 2013) yang menyatakan bahwa peningkatan rasio pajak dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Penelitian tersebut sejalan dengan Feldstein (2012) bahwa dengan kebijakan tarif pajak yang tinggi tersebut berpengaruh secara negatif terhadap pertumbuhan karena menghambat konsumsi dan investasi yang berdampak pada peningkatan ketimpangan.

Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah tingginya ketimpangan pendapatan di Indonesia yang dapat menjadi masalah di kemudian hari. Kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran dalam mengelola perekonomian memperburuk ketimpangan pendapatan di Indonesia. Ketimpangan pendapatan sulit untuk dihapuskan, melainkan hanya dapat dikendalikan, oleh karena itu peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Berdasarkan sumber dari *Credit Suisse* (2018) ketimpangan pendapatan di Indonesia menempati peringkat 3 di Asia oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan.

Berdasarkan fenomena di atas dan adanya perbedaan hasil dari penelitian - penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan menggunakan periode tahun dan variabel yang berbeda dengan judul pengaruh indikator moneter, fiskal dan keterbukaan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
2. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
3. Apakah impor berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
4. Apakah nilai tukar berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
5. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
6. Apakah pajak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?

C. Pembatasan Masalah

Tujuan adanya pembatasan masalah yaitu agar penelitian terfokus pada variabel yang diteliti sehingga tidak menyebabkan kesulitan dalam pemahaman yang sudah disesuaikan dengan penelitian ini. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah “pengaruh indikator moneter, fiskal dan keterbukaan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia” dengan variabel dependen yaitu ketimpangan pendapatan (indeks gini) dan variabel independen yaitu inflasi, suku bunga, impor, nilai tukar, pengeluaran pemerintah dan pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari Badan Pusat Statistik (BPS), *World Bank*, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan *International Monetary Fund* (IMF).

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 1990-2021.
2. Menganalisis pengaruh suku bunga terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 1990-2021.

3. Menganalisis pengaruh impor terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 1990-2021.
4. Menganalisis pengaruh nilai tukar terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 1990-2021.
5. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 1990-2021.
6. Menganalisis pengaruh pajak terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 1990-2021.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan atau memperkuat teori yang sudah ada mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ketimpangan pendapatan di Indonesia sehingga dapat membantu dalam pengembangan kebijakan dan strategi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah pusat penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan informasi penting bagi pemerintah dalam upaya mengatasi ketimpangan pendapatan di Indonesia.
 - b. Bagi pemerintah daerah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam proses pemerataan ekonomi daerah.
 - c. Bagi kementerian bidang perekonomian penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan melalui program-program yang tepat dan berkelanjutan.
 - d. Bagi masyarakat umum penelitian ini diharapkan dapat merangsang kesadaran sosial dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi ketimpangan pendapatan yang terjadi.